



Agama, Humanisme, dan Relevansi Pancasila

Oleh : Sugeng Bayu Wahyono

*Dosen Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta dan
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.*

Fakta sosiologis menunjukkan bahwa heterogenitas telah menjadi ciri yang demikian mapan dan kuat dalam masyarakat di Indonesia.. Dalam agama, kelompok etnis, pengalaman sejarah, dan kondisi geografis terdapat variasi yang besar antara berbagai kelompok penduduk, dan masing-masing berpotensi berkembang menjadi identitas partikularistik. Sementara itu, fakta historis juga menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai cultural solidarity groups atau juga dikenal sebagai aliran, terus mewarnai perjalanan sejarah nusantara.

Menyadari akan fakta sosiologis dan fakta historis itu para pendiri bangsa telah beberapa kali melakukan eksperimen politik untuk memecahkan problem partikularistik tersebut dalam kerangka membangun negara bangsa (*nations state*). Salah satu di antaranya adalah sebuah konsensus politik yang diprakarsai oleh segenap tokoh perintis kemerdekaan, yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda 1928. Akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya tetap kurang efektif menetralsir tarik menarik kepentingan politik yang berbasis aliran. Proses itu hingga sekarang terus berlangsung, masing-masing tetap berusaha melakukan praktik peneguhan identitas kelompok.

Berbagai peristiwa kerusuhan yang berlatarbelakang agama seperti amuk massa di Cikeusik, Pandegelang, Banten yang menewaskan 3 orang Ahmadiyah, dan kemudian di Temanggung yang membakar dan merusak 3 gereja menunjukkan bahwa masih ada saja kekuatan kelompok yang mengingkari keberagaman sebagai identitas keindonesiaan. Merespons atas

peristiwa tersebut, negara memang sudah semestinya berperan penting dalam upaya melindungi warganya, dan perlu terus bersikap tegas dalam menanggapi tindak kekerasan.

Akan tetapi ada baiknya juga melihat terancamnya kebinekaan sebagai identitas keindonesiaan itu melalui cara yang lebih introspektif. Artinya, ada upaya reflektif dan mawas diri bahwa jangan-jangan cara beragama kita selama ini memang cenderung meneguhkan identitas tunggal. Sebagaimana dapat kita saksikan bersama dalam duabelas tahun terakhir, yang lebih berkembang adalah pemahaman agama yang skriptualistik, normatif, dan hegemonik, dan bahkan agama mengalami proses instrumentalisasi bagi upaya penyeragaman identitas baik secara politik maupun kebudayaan. Kenyataan menunjukkan bahwa agama telah sering kali terbukti menjadi alat legitimasi kepentingan posisi kekuatan tertentu, baik politik, ekonomi, sosial, maupun kultural. Dalam posisi seperti itu, kemudian agama menjadi narasi besar yang dominatif, dan kemudian kehilangan sentuhan lokal yang sarat kearifan dan humanisme.

Repotnya dalam posisinya sebagai narasi dominan itu agama kemudian menggunakan strategi yang berorientasi pada pemurnian dengan tujuan mengatur, mengontrol, dan mendisiplinkan

segenap produksi lokalitas. Dengan mewarisi konstruksi kekuatan yang mendominasi dan mensubordinasi yang dilakukan oleh modernisasi, agama kemudian juga tampil sebagai kekuatan dominatif yang melakukan tekanan kepada apa saja yang bersifat lokal. Pemurnian ajaran agama yang dijadikan program utama, membawa implikasi menempuh cara homogenisasi atau penyeragaman terhadap entitas kebudayaan lokal. Puritanisasi agama sebagai sebuah gerakan politik dan kebudayaan, selepas rezim pemerintahan Orde Baru yang memarjinalkannya, kemudian justru tampil menjadi *fotocopy*-nya dengan melakukan model gerakan mirip kekuatan dominatif yang mensubordinasikan eksistensi entitas lokal. Gerakan agama puritan itu juga meminjam instrumen hegemonik dari kekuatan yang selama ini merepresinya, untuk kemudian dengan menggunakan strategi yang sama menekan dan memarginalkan produksi lokalitas.

Pada proses selanjutnya agama kemudian melihat lokal harus ditarik dan dipaksa seperti yang terjadi di pusat asalnya sehingga produksi lokalitas harus dimurnikan, diluruskan dan dibina, sekaligus dikontrol. Implikasinya agama kemudian menjadi kehilangan sentuhan lokal, sehingga agama menjadi tampil garang dan kehilangan watak dasarnya yang humanistik.

Padahal jika ditelusuri mulai awal

sejarah kelahirannya, agama pada prinsipnya merupakan reaksi atas sistem politik yang dehumanistik, sehingga watak dasar sebuah agama sejak awal adalah humanisme. Para nabi agama apa pun pada dasarnya adalah tokoh humanis yang mampu menjawab tantangan zaman, yang pada zamannya itu dalam situasi dehumanistik. Dengan melakukan refleksi dan kontemplasi di tempat-tempat sepi, para nabi mendapatkan wahyu dari Tuhan yang kemudian dijadikan spirit utama melawan otoritarianisme yang dehumanistik. Jadi semangat agama yang dibawa oleh para nabi, pada hakekatnya adalah kekuatan keilahian yang membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan, deskriminasi, dan eksploitasi, bukan untuk menyeragamkan terhadap perbedaan. Oleh karena itu, agama akan bisa menjadi ukuran kebenaran, tergantung sejauh mana agama punya komitmen emansipatoris dan solidaritas yang dibuktikan dalam praksis dialog antarkebudayaan (termasuk antaragama), dan perjuangan pembebasan pada kaum lemah.

A. Pembebasan

Akan tetapi agama dalam perkembangan selanjutnya sering kali tidak luput dari tekanan untuk meligitimasi tindakan yang terkadang dehumanistik. Dalam pandangan Hegel Muda salah satu penyebabnya adalah karena

Tuhan diposisikan sebagai asing dan hanya obyek, sehingga agama dalam prakteknya justru menjadi sumber aliniasi. Dengan pemahaman seperti itu, manusia kemudian menjadi teraliniasi dengan alam, dirinya sendiri, dan dengan sesama manusia.

Dalam pada itu menarik disimak, bahwa pada tataran praksis agama menunjukkan wajah yang mendua, terkadang menampakkan diri apa yang oleh Gregory Baum (dalam bukunya yang berjudul *Religion and Alienation*, Marquette: Paulist Press, 1975) disebut sebagai *liberating* (yang membebaskan), tetapi pada suatu saat tidak jarang justru tampak sebagai *enslaving* (yang menundukan). Mengikuti tesis ini, dapat diungkapkan pernyataan hipotetik, bahwa semakin agama berorientasi normatif-skriptualistik, maka semakin menunjukkan karakter penundukannya. Sebaliknya, semakin agama membuka diri untuk dipahami secara historis dalam perspektif ilmu pengetahuan, maka akan terbuka watak pembebasannya.

Baum mensintesis antara paradigma teologi yang menganggap bahwa agama adalah sesuatu yang baku dan obyektif, bukan suatu yang subyektif, dan paradigma humanistik-historis yang senantiasa berbeda dalam memaknai realitas. Dengan kerangka sintetik antara sisi normatif dan historis tentang realitas melalui kacamata sosiologi

pengetahuan Karl Mannheim, Baum menawarkan titik sintetik yang tercermin dalam pandangannya tentang emansipasi dan solidaritas. Artinya, diskursus kebenaran ditarik jauh dari hanya soal obyektivitas dan subyektivitas menuju diskursus sejauh mana kebenaran tersebut mencerminkan misi pembebasan pada kaum tertindas yang didasari oleh komitmen emansipatoris dan dialog yang didasari oleh komitmen solidaritas.

Senada dengan itu, Amin Abdullah (dalam bukunya berjudul *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) memahami agama juga bisa dengan perspektif historis, dalam arti agama tidak bisa dipisahkan dari kesejarahan (historiografi) dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Agama terangkai oleh konteks kehidupan pemeluknya, dan karena itu, akses pemahaman manusia terhadap realitas transendental agama (dimensi normatif agama) tidak akan pernah persis seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu sangatlah naif jika ada manusia beragama yang mengklaim diri sebagai satu-satunya pemilik kebenaran transendental.

Memaknai agama dalam konteks historiografi, menjadikan sosiologi pengetahuan memiliki urgensi untuk mengembangkan wawasan diskursus keagamaan. Agama tidak terus tampil sebagai wilayah yang

tidak tersentuh pikiran manusia, tetapi selalu bersuara dan berada dalam *setting* dialektika peradaban sejarah manusia. Agama dapat ditempatkan dalam wilayah rasionalitas kebudayaan yang selalu terbuka untuk dinegosiasikan, dialog, dan jika perlu resistensi.

Sebuah perangkat norma, apa pun latar belakangnya, entah itu politik, tradisi, demikian pula agama mesti perlu dimintai pertanggung jawaban, mengapa seperangkat norma itu mengatur tindakan manusia. Dengan demikian setiap sistem normatif mesti membuka diri bagi diskursus, tidak menjadi entitas ideologis tertutup. Sudah banyak fakta menunjukkan, ketertutupan sebuah ideologi, senantiasa menghasilkan pengikut yang memilih cara kekerasan, dan secara tidak sadar mendorong terciptanya dehumanisasi. Yang terjadi tidak lebih hanya sekadar penundukan kesadaran manusia yang menjadikannya sebagai obyek dan dicabut otonomi subyektifnya. Saat itulah, ideologi termasuk agama mulai ikut menjadi bagian dari proses hegemonisasi manusia.

Pemahaman agama secara historiografik itulah yang akan dapat mendorong agama akomodatif terhadap demokrasi dan mengakui kultur lokal. Dengan kata lain, pemahaman agama yang dialektik, inklusif, dan substantif, akan mampu menjadikan agama sebagai salah satu komponen sistem masyarakat

yang berbasis multikulturalisme. Dalam konteks masyarakat Indonesia, munculnya isu perlunya pengembangan *civil society* misalnya, agama akan dapat sebagai penguat masyarakat sipil sepanjang tidak mempunyai pretensi untuk hanya sekadar memberi labelisasi dengan nama "masyarakat madani" yang secara historis tidak dikenal di Indonesia.

B. Relevansi Pancasila

Dalam suatu kesempatan berdiskusi dengan Haryatmoko, mengutip pandangan posmodernisme, ia mengatakan bahwa orang sekarang ini kehilangan keyakinan akan masa depan yang revolusioner. Ideologi politik menjadi tidak menarik lagi, demikian pula bentuk-bentuk militanisme. Kedua hal itu hanya menarik bagi mereka yang kalah dalam persaingan. Kekecewaan-kekecewaan terhadap janji kemajuan dan kebahagiaan yang tak pernah terpuaskan akhirnya membawa pada terjadinya demistifikasi utopia yang pernah menjadi acuan utama modernisme.

Oleh karena itu kalau sekarang kita mendiskusikan ideologi Pancasila, jangan-jangan kita sekarang ini juga termasuk bangsa yang sedang kalah dalam persaingan. Ketika kita memasuki apa yang sering dikenal sebagai era globalisasi, tidak ada satu sektor pun yang dapat diandalkan ikut bermain dalam percaturan

global. Pada sektor pertanian yang sebelumnya merupakan sektor andalan dan sekaligus merupakan karakter sebagai negara agraris-maritim, tetapi sekarang pada sektor ini kita kalah bersaing. Ironisnya sebagai sebuah negara agraris-maritim justru kita sekarang menjadi pengimpor beras, jagung, kedelai, gula, dan bahkan garam.

Memang harus kita akui, ideologi Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara, pernah begitu populer dalam era Soekarno dan era Soeharto. Akan tetapi pada kedua era tersebut sayangnya Pancasila tidak pernah digunakan sebagai spirit utama kemandirian bangsa. Pada era Soekarno, memang pernah didengungkan Ekonomi Berdikari, tetapi karena tidak terdapat perencanaan ekonomi yang jelas, akhirnya janji kemakmuran tidak dapat diwujudkan, dan bahkan perekonomian mengalami masa yang begitu buruk. Pancasila pada era Soekarno hanya efektif digunakan sebagai ideologi pemersatu bangsa, tetapi gagal menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pada era pemerintahan Soeharto, Pancasila dipakai secara efektif sebagai landasan politik, ekonomi, dan kehidupan sosial-budaya. Di bidang politik, Pancasila secara perlahan tapi pasti mampu menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi massa. Bahkan

organisasi politik yang sebelumnya menggunakan Islam sebagai asas, akhirnya bersedia menerima Pancasila sebagai asas. Melalui kegiatan yang populer disebut sebagai P4, Pancasila dalam era Orde Baru tersosialisasi secara intensif ke berbagai kalangan masyarakat. Akan tetapi karena negara tampil begitu kuat dan dominan, akhirnya dipakai oleh penguasa sebagai instrumen kemapanan kekuasaan. Monopoli tafsir kebenaran atas rumusan Pancasila oleh penguasa Orde Baru, menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Dengan menerapkan prinsip *we and others*, Pancasila oleh penguasa Orde Baru dipakai menjadi alat meminggirkan lawan-lawan politik.

Pancasila juga dijadikan sebagai dasar utama dalam politik pembangunan pada era Orde Baru dengan modernisasi sebagai pilihan utama. Pemerintah pada waktu itu yakin betul, bahwa modernisasi akan mampu mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Akan tetapi Pancasila tidak menjadi landasan kemandirian bangsa, sehingga proses modernisasi yang begitu intensif justru menjadikan bangsa Indonesia masuk dalam situasi ketergantungan yang semakin akut. Melalui modernisasi yang bercita-cita mewujudkan masyarakat industri yang ditopang oleh sektor pertanian yang tangguh, gagal diwujudkan, dan menjelang millennium 2000 pemerintahan Orde Baru di bawah

pimpinan Soeharto jatuh.

Indonesia kemudian memasuki babak baru yang sering disepakati memasuki era reformasi. Konstelasi politik pun berubah, dari sistem pemerintahan otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara besar yang menganut sistem pemerintah demokratis.

Pertanyaannya adalah di mana letak relevansi Pancasila dalam era yang terus berubah dan demokratis sekarang ini? Jika sepakat bahwa Indonesia merupakan negara yang plural maka kondisi obyektif ini akan terus membuat Pancasila tidak akan pernah kehilangan relevansinya. Toleransi misalnya, salah satu nilai keutamaan yang terkandung dalam Pancasila adalah toleransi sebagaimana tercantum dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa serta sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Oleh karena itu jika munculnya berbagai kehendak yang ingin membuat Indonesia sebagai negara yang homogen, tentu tidak sesuai dengan Pancasila, dan secara politik akan menimbulkan konflik.

Dengan kata lain, bahwa Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen semua sudah tahu, tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa ada saja kekuatan yang ingin

mengingkari kenyataan itu dan kemudian memaksakan menjadi masyarakat yang homogen dengan dalih demi persatuan dan kesatuan atau demi mayoritas sebagaimana dilakukan oleh kuasa negara dan agama. Yang dibayangkan kemudian sebuah kekuatan dominatif dan tentu saja pilihan yang ditempuh adalah melakukan penyeragaman, anti keanekaragaman, anti lokalitas, dan juga berarti anti-demokrasi.

Fakta kemajemukan itu sering diingkari dan kurang ditopang oleh semangat untuk menerima perbedaan. Bahkan yang sering terjadi justru perbedaan itu dieksploitasi untuk kepentingan politik kelompok yang kurang mengedepankan kepentingan bersama sebagai bangsa. Akibatnya, dalam perjalanan sejarah bangsa ini sering kali diterpa oleh arus penyeragaman yang dipaksakan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang bersandar pada pemeritahan otoriter.

Terhadap semakin menguatnya kehendak untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang homogen dan monokultur maka hanya Pancasila yang dapat mentralisirnya. Pancasila senantiasa memfasilitasi warga yang plural untuk mengembangkan diri. Dalam iklim yang plurarlistiklah masyarakat bisa lebih dinamik, kreatif, dan dapat mengembangkan secara

optimal potensi dirinya karena ada peluang untuk mengembangkan diri secara otonom dan merdeka menentukan pilihan dari sekian alternatif yang terbuka. Lebih dari itu, arus penyeragaman sebenarnya juga bertentangan dengan arus besar bangsa. Setuju atau tidak, kita sebagai bangsa dipaksa oleh keadaan harus menjadi masyarakat yang terbuka, yang deregulatif, dan memberi ruang besar bagi berkembangnya kemajemukan dan potensi masyarakat yang penuh daya hidup. Dengan kata lain, serba penyeragaman bertentangan dengan kecenderungan makro yang kian mengglobal dan mengandaikan berkembangnya arus demokratisasi yang meniscayakan otonomi memilih dan kemerdekaan menyalurkan kehendak. Sedangkan dalam arus penyeragaman sangat sarat dengan pemaksaan kehendak.

Melihat tuntutan dan tantangan yang berkembang di masyarakat agaknya arus penyeragaman yang merasuk dalam masyarakat pluralistik selama ini kiranya perlu dihentikan. Biarkanlah semua warga masyarakat berpikir, berkehendak, berimajinasi, dan berkreasi secara merdeka sesuai kapasitas, konteks permasalahan, dan kondisi sosial-kulturalnya. Hanya Pancasila yang mampu mengembangkan potensi daya kreasi warganya yang sesuai dengan talentanya